



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**OPTIMALISASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
DALAM RANGKA Mendukung REFORMASI
BIROKRASI MELALUI KONSELING**

NAMA : DODY IRAWAN, SP, M.Si
NIP. : 19850312 200912 1 001
N D H : 23

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Reformasi birokrasi yang telah lama digulirkan sebetulnya memiliki sasaran mendasar berupa perubahan mindset (polapikir) SDM aparatur dan sistem yang berjalan yang dapat mengendalikan organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan dan pelayanan publik.

Salah satu upaya dalam mewujudkan profesionalisme pegawai negeri sipil yaitu dengan melakukan pembinaan SDM melalui penegakan disiplin pegawai. Sebagaimana diketahui bahwa masih ada pegawai yang bermasalah yaitu adanya pelanggaran kewajiban dan larangan pegawai negeri sipil sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil.

Pelanggaran yang dilakukan diantaranya tidak mentaatiperaturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, dan tidak mentaati ketentuan jam kerja. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus dilakukan pembinaan tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pelanggaran yang dilakukan dan terbukti harus dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini atasan langsung.

Dari pola pembinaan kepegawaian dilakukan dengan cara memeriksa dan menjatuhi hukuman disiplin walaupun belum dilakukan secara optimal. Akan tetapi dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tidak pernah ada yang mendampingi sehingga tidak diketahui apa yang melatarbelakangi pegawai melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu perlunya dilakukan optimalisasi penegakan disiplin pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi melalui konseling.